

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
1	Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Informasi mengenai visi dan misi, tugas dan fungsi, kewenangan, prinsip dasar, budaya organisasi, kerangka konsep dan lingkup wilayah Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, moto pelayanan, kebijakan strategis, anggaran, target kinerja, struktur organisasi, alamat dan lingkup wilayah kerja BPOM	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Lima tahun sekali, (BPOM: 3 bulan setelah Rencana Jangka Menengah Nasional atau RPJMN ditetapkan. Unit Organisasi/Satuan Kerja: 1 bulan setelah Rencana Strategis BPOM ditetapkan), Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 4 tahun (Permanen)	https://www.pom.go.id/profil
2	Profil Organisasi Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM	Informasi mengenai visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan lingkup wilayah kerja Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	5 (lima) tahun sekali dan diperbarui setiap ada perubahan, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 4 tahun (Permanen)	https://www.pom.go.id/profil#v-pills-wilayah

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
3	Profil Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) BPOM	Informasi mengenai nama, jabatan, pendidikan terakhir, penghargaan (jika ada) pimpinan BPOM	Biro Sumber Daya Manusia	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah berhenti/pensiun, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://www.pom.go.id/profil#v-pills-profil
4	Profil Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT	Informasi mengenai nama, jabatan, pendidikan terakhir, penghargaan (jika ada) Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√		Aktif 1 tahun setelah berhenti/pensiun, Inaktif 9 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/profil#v-pills-wilayah
5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target BPOM, Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta dan sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√		BPOM: Aktif 1 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen) Unit Kerja Pusat dan UPT: Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/rencana-kinerja-tahunan
6	Rencana Kerja BPOM	Informasi yang memuat visi dan misi, kegiatan prioritas, sasaran strategis dan indikator kinerjanya serta program dan pendanaan pada level BPOM	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://www.pom.go.id/kinerja/rencana-kerja

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
7	Rencana Strategis di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM dan Unit Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan BPOM	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Lima tahun sekali, (BPOM: 3 bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN ditetapkan. Unit Organisasi/Satuan Kerja: 1 bulan setelah Rencana Strategis BPOM ditetapkan), Jakarta dan sesuai wilayah Satuan Kerja	√	√	BPOM: Aktif 2 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Permanen) Satuan Kerja: Aktif 2 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/rencana-strategis
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat rincian IKU dan manual IKU yang terdiri dari unit organisasi, level unit organisasi, perspektif, status indikator, sasaran strategis, dan definisi	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di	Lima tahun sekali, (BPOM: 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan. Unit Organisasi/	√		BPOM: Aktif 2 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun. (Permanen)	https://www.pom.go.id/kinerja/sk-iku

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
				lingkungan BPOM	Satuan Kerja: 1 bulan setelah Rencana Strategis BPOM ditetapkan), Jakarta dan sesuai wilayah Satuan Kerja			Unit Kerja Pusat dan UPT: Aktif 2 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)	
9	Perjanjian Kinerja di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target, dan jumlah anggaran BPOM, Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta dan sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	√	BPOM: Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Permanen) Unit Kerja Pusat dan UPT: Aktif:3 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/pk
10	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target perbulan, dan jumlah anggaran BPOM, Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta dan sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	√	BPOM: Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Permanen) Unit Kerja Pusat dan UPT: Aktif 3 tahun,	https://www.pom.go.id/kinerja/rapk

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
								Inaktif 2 tahun (Musnah)	
11	Laporan Tahunan di lingkungan BPOM	Informasi terkait laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPOM, Unit Kerja Pusat, dan UPT di lingkungan BPOM dalam kurun waktu satu tahun	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta	√	√	BPOM dan UPT: Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen) Unit Kerja Pusat: Aktif 1 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/laporan-tahunan-4
12	Laporan Kinerja di lingkungan BPOM	Informasi terkait laporan capaian kinerja sekaligus evaluasi terhadap kinerja BPOM dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM dalam kurun waktu satu tahun	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta	√	√	BPOM dan Satuan Kerja UPT: Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen) Satuan Kerja Pusat: Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/lap
13	Laporan kinerja interim di lingkungan BPOM	Informasi mengenai hasil <i>monitoring</i> dan capaian kinerja BPOM dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM pada triwulan berjalan	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap triwulan, Jakarta dan sesuai wilayah Satuan Kerja	√	√	BPOM dan Satuan Kerja UPT:	https://www.pom.go.id/kinerja/laporan-kinerja-interim-bpom

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
				2. Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan BPOM				Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah) Satuan Kerja Pusat: Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	
14	Buku kinerja BPOM dalam angka	Laporan yang menyajikan informasi progres kinerja pengawasan Obat dan Makanan setiap triwulan pada tahun berjalan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap triwulan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/bpom-dalam-angka
15	Data statistik keuangan BPOM	Informasi mengenai data statistik keuangan berupa anggaran dan realisasi anggaran BPOM	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap triwulan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun setelah Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://app.pow.erbi.com/view?r=eyJrIjoiNjMOZTIOM2EtNjBmOC00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOCl1ZmOzLTdjZDA5NGM5MDcwZSIsImMiOiEwfQ%3D%3D pada Menu Anggaran

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
16	Laporan Keuangan B POM Audited	Informasi mengenai Laporan Keuangan B POM, Unit Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan B POM yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun setelah Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://www.pom.go.id/kinerja/lu
17	Laporan Barang Milik Negara (BMN) B POM Audited	Informasi mengenai Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki B POM berupa data aset tetap dan persediaan beserta transaksi keuangan dan nonkeuangan yang telah melalui proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk di dalamnya adalah Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN)	1. Biro Umum 2. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan B POM	1. Kepala Biro Umum 2. Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan B POM	Setiap tahun, Jakarta dan sesuai wilayah Satuan Kerja	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://www.pom.go.id/kinerja/bmn
18	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara	Informasi mengenai ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Wajib Lapo	Inspektorat I dan II	Inspektur I dan II	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://ppid.pom.go.id/informasi-publik/informas

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
	Negara (LHKPN)	(PN/WL) BPOM sesuai ketentuan							i?i=1&t=informasi secara berkala pada Sub Menu LHKPN
19	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk BPOM	Informasi yang berisi akumulasi dari DIPA Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang disusun oleh Pengguna Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/dipa
20	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Informasi mengenai DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BPOM	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Setiap tahun sekali, Jakarta dan sesuai wilayah Satuan Kerja	√	√	Aktif 1 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/dipa
21	Data statistik pegawai di lingkungan BPOM	Informasi data statistik pegawai di Lingkungan BPOM diantaranya jumlah pegawai, profil gender, profil pendidikan, jenis jabatan, dan lain-lain	Biro Sumber Daya Manusia	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun setelah data diperbarui, Inaktif 3 tahun (Musnah)	• https://birosdm.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
									<ul style="list-style-type: none"> https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNmM0ZTI0M2EtNjBmO C00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOC1iZmQzLTdjZDA5NGM5MDcwZSIsImMiOiJlY2F0Q3D%3D <p>pada Menu Pegawai</p>
22	Laporan Reformasi Birokrasi BPOM	Informasi mengenai hasil implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun setelah evaluasi Reformasi Birokrasi, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://rb.pom.go.id/id/info-terkini/laporan-hasil-evaluasi-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-bpom-tahun-2022
23	Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM	Informasi mengenai Rencana Reformasi Birokrasi BPOM periode lima tahun	1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya	Lima tahun sekali dan diperbarui setiap ada	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku,	https://rb.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
			Pengawasan Obat dan Makanan, 2. Biro Hukum dan Organisasi	Manusia - Pengawasan Obat dan Makanan 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	perubahan, Jakarta			Inaktif: 3 Tahun (Permanen)	pada Menu Roadmap
24	Laporan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat: 1. Hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh setiap UPP, mencakup aspek-aspek dan indikator-indikator penilaian mengacu pada peraturan yang berlaku 2. Catatan dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik oleh UPP 3. Berita Acara evaluasi yang ditandatangani oleh pembina UPP dan Tim Evaluator/Penilai UPP	Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
25	Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan	Informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Hukum dan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Peraturan Perundangan lainnya: Aktif 1 tahun setelah diundangkan,	https://jdih.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
	Obat dan Makanan	dan produk hukum lainnya bersifat pengaturan						Inaktif 3 tahun (Permanen) Peraturan BPOM: Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Permanen)	
26	Rancangan peraturan perundang-undangan/regulasi terkait Obat dan Makanan	Informasi terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Obat dan Makanan, berupa: 1. Rancangan Undang-Undang (RUU); 2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP); 3. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres); 4. Rancangan Peraturan BPOM; dan 5. Rancangan produk hukum lainnya yang bersifat pengaturan terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Peraturan Perundangan lainnya: Aktif 1 tahun setelah diundangkan, Inaktif 3 tahun (Permanen) Peraturan BPOM: Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://jdih.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
27	Produk hukum yang bersifat penetapan, kecuali bersifat rahasia	Informasi produk hukum BPOM yang ditetapkan oleh Kepala BPOM maupun Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) BPOM di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang berupa Keputusan sebagai berikut: 1. Keputusan Kepala BPOM; 2. Keputusan Pejabat Tinggi; Madya (Eselon I) BPOM; dan 3. Keputusan Pimpinan Unit Kerja	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Kepala BPOM: Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Permanen) Pejabat Tinggi; Madya dan Pimpinan Unit Kerja: Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://jdih.pom.go.id/
28	Memorandum of Understanding (MOU)/ Perjanjian Kerja Sama	Informasi yang memuat: 1. Daftar Instansi Pemerintah dan/atau Organisasi Non Pemerintah yang melakukan kerja sama dengan BPOM; dan 2. Muatan kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau organisasi nonpemerintah yang memuat pihak-pihak dan ruang lingkup kerja sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir, Inaktif 5 tahun (Permanen)	https://kerjasama.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
29	Berita Aktual/Siaran Pers/Peringatan Publik/Penjelasan/Klarifikasi BPOM, Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MAPOM)	Informasi yang berisi publikasi kinerja pengawasan dan informasi Obat dan Makanan serta penjelasan/klarifikasi terkait isu di bidang Obat dan Makanan	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, UPT di lingkungan BPOM	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Setiap saat, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.pom.go.id/berita • https://www.pom.go.id/siaran-pers • https://www.pom.go.id/penjelasan-publik • https://www.pom.go.id/layanan#v-pills-4
30	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai peraturan yang berlaku; 2. Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei; dan 3. Laporan Tindak Lanjut Survei per-semester 	Biro Hukum dan Organisasi, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://rb.pom.go.id/id/hasil-survei-kepuasan-pelanggan/survei-kepuasan-masyarakat-0

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
31	Hasil Survei Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Informasi hasil survei efektivitas KIE BPOM yang memuat metodologi, demografi responden, indeks efektivitas KIE, dan rekomendasi	Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/kinerja/lap
32	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di lingkungan BPOM	Informasi bisnis proses pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berlaku di lingkungan BPOM	1. Biro Hukum dan Organisasi (<i>Management Representative</i> Pusat) 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi (<i>Management Representative</i> Pusat) 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta dan sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
33	Program Kerja Pengawasan Tahunan	Rencana Pengawasan Tahunan yang berisi rencana pengawasan intern yang memuat faktor resiko Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Inspektorat I dan II	Inspektur I dan II	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 1 tahun (Permanen)	https://ittama.pom.go.id/view/browse/pkpt
34	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran di lingkungan BPOM	Inspektorat I dan II	Inspektur I dan II	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://sangintegritas.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
35	Informasi terkait pengawasan intern	Informasi yang memuat jumlah, jenis, dan gambaran umum pengawasan intern di lingkungan BPOM	Inspektorat I dan II	Inspektur I dan II	Setiap triwulan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 2 tahun	https://ppid.pom.go.id/informasi-publik/informasi?i=3&t=informasi_setiap_saat pada Sub Menu Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran serta laporan penindakannya
36	Data rekapitulasi jumlah KIE serta laporan KIE dan publikasi Obat dan Makanan	Informasi yang memuat: 1. Data rekapitulasi jumlah kegiatan KIE yang dilaksanakan meliputi jenis kegiatan, target peserta, <i>stakeholders</i> , topik, metode pelaksanaan, lokasi, narasumber, frekuensi, waktu pelaksanaan dan penyelenggara 2. Seluruh kegiatan KIE dan publikasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat dan UPT yang melakukan KIE	Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melaksanakan	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melaksanakan	Setiap tahun, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
37	Data rekapitulasi jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	Data rekapitulasi jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan meliputi: 1. Jumlah layanan yang diterima 2. Jumlah layanan yang diselesaikan 3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian 4. Profil pengguna layanan 5. Media layanan	1. Biro Hukum dan Organisasi UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan) 2. Seluruh UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi UPT 2. Seluruh Kepala UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap tahun, Jakarta dan sesuai wilayah UPT	√		Aktif 1 tahun setelah tindak lanjut pengaduan selesai, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://ulpk.pom.go.id/id/MM/20191017221313/0.html
38	Ringkasan laporan akses Informasi Publik	Informasi yang memuat: 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak	1. Biro Hukum dan Organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan) 2. Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan) 2. Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap triwulan dan setiap tahun, Jakarta dan sesuai wilayah UPT	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://ppid.pom.go.id/laporan-publik/laporan?i=1&t=Ringkasan_Laporan_Layanan_Informasi_Publik

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		4. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik							
39	Daftar Informasi Publik di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat daftar informasi publik di lingkungan BPOM yang terbuka untuk publik	Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sejak tanggal ditetapkan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Keputusan%20Pejabat%20Pengelola%20Informasi%20dan%20Dokumentasi%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20NOMOR%20HK.02.02.22.221.06.23.49%20Tahun%202023%20Tentang%20Daftar%20Informasi%20Publik%20Di%20Lingkungan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20Dan%20Makanan.pdf

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
40	Kalender kegiatan	Daftar kegiatan/agenda penting pimpinan B POM terkait pelaksanaan tugas B POM	Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan B POM	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan B POM	Sepanjang tahun, Jakarta dan sesuai wilayah UPT	√		Aktif 1 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://ppid.pom.go.id/kalender/list
41	Informasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) B POM	Informasi mengenai seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) B POM	Biro Sumber Daya Manusia	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Diperbaharui setiap ada perubahan	√		Aktif 2 tahun setelah semua diangkat menjadi ASN, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://casn.pom.go.id/
42	Konten katalog sektoral	Jenis komoditas, nama penyedia, merek/tipe dan spesifikasi harga barang/jasa yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap saat, melalui aplikasi katalog sektoral LKPP	√		Aktif 1 tahun setelah pemeriksaan, Inaktif 5 tahun (Musnah)	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/L15
43	Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa katalog elektronik	Informasi terkait pengumuman pembukaan etalase e-katalog	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap saat, melalui aplikasi katalog sektoral LKPP	√		Aktif 1 tahun setelah pemeriksaan, Inaktif 5 tahun (Musnah)	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/L15

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
44	Laporan hasil pengawasan kearsipan internal	Informasi hasil penilaian kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM terkait dengan kepatuhan Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM dalam implementasi kebijakan kearsipan yang berlaku di BPOM	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://siroum.pom.go.id/informasi publik pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala
45	Laporan hasil pengawasan kearsipan BPOM	Informasi hasil penilaian kualitas penyelenggaraan kearsipan BPOM yang merupakan hasil pengawasan kearsipan eksternal berdasarkan hasil verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://siroum.pom.go.id/informasi publik pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala
46	Penetapan pemusnahan arsip di lingkungan BPOM	Informasi dalam bentuk Keputusan Kepala BPOM tentang penetapan pemusnahan arsip di lingkungan BPOM terdiri atas Unit Kerja Pusat/UPT di lingkungan BPOM yang arsipnya ditetapkan musnah	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://siroum.pom.go.id/informasi publik pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
47	Data pemusnahan arsip di lingkungan BPOM	Informasi mengenai data Unit Kerja Pusat atau UPT di lingkungan BPOM yang melakukan pemusnahan arsip	1. Biro Umum 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang telah melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip	1. Kepala Biro Umum 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang telah melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 Tahun, Inaktif 3 Tahun (Permanen)	https://siroum.pom.go.id/informasi_public pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala
48	Data pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan BPOM	Informasi mengenai data Unit Kerja Pusat atau UPT di lingkungan BPOM yang melakukan pemindahan arsip	1. Biro Umum 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Umum 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta dan masing-masing wilayah kedudukan UPT BPOM	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Musnah)	https://siroum.pom.go.id/informasi_public pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala
49	Penyerahan arsip di lingkungan BPOM	Informasi dalam bentuk Keputusan Kepala BPOM tentang penetapan penyerahan arsip di lingkungan BPOM terdiri atas Unit Kerja Pusat/UPT BPOM yang arsipnya ditetapkan permanen	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://siroum.pom.go.id/informasi_public pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
50	Data penyerahan arsip di lingkungan BPOM	Informasi mengenai data Unit Kerja Pusat atau UPT di lingkungan BPOM yang melakukan penyerahan arsip	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://siroum.pom.go.id/informasi_public pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala
51	Data arsip inaktif di Unit Kearsipan I BPOM	Informasi mengenai data arsip inaktif yang dikelola oleh Unit Kearsipan I BPOM, yaitu Biro Umum	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://siroum.pom.go.id/informasi_public pada Menu PPID Sub Menu Informasi Secara Berkala
52	Standar Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat: 1. Penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penyampaian Layanan/ <i>Service Delivery</i> (Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Pelayanan; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi) 3. Pengelolaan Pelayanan/ <i>Manufacturing</i> (Dasar Hukum; Sarana	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Seluruh Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Sejak tanggal ditetapkan, Jakarta dan sesuai wilayah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://jdih.pom.go.id/view/slide/4207028aab9836c96f5eb88ded46bdbe/1226/-/2020

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		<p>dan Prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi Pelaksana; Pengawasan Internal; Jumlah Pelaksana; Jaminan Pelayanan; Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; Evaluasi Kinerja Pelaksana)</p> <p>sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku</p>							
53	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Informasi pengadaan barang dan jasa berupa data rekapitulasi pengadaan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP); 2. Tahap pemilihan yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan 3. Tahap pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Umum 2. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum 2. Kepala Seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM 	Setiap Tahun, Jakarta dan sesuai wilayah Satuan Kerja	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://lpse.pom.go.id/eproc4/amel

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
54	Surat Edaran terkait kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Surat Edaran terkait kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang terkait dengan <i>stakeholders</i> /pihak eksternal	Seluruh Unit Kerja Pusat terkait	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat terkait	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://jdih.pom.go.id/product/search/4c43212f3dae11676ba6b0d63686a1f3/all/all/all/14/all 1 atau pada <i>Subsite</i> Layanan BPOM terkait
55	Naskah metode analisis	Informasi terkait metode analisis pengujian yang telah divalidasi/diverifikasi di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
56	Laporan dan sertifikat baku pembanding	Informasi mengenai laporan dan sertifikat baku pembanding (nama zat, nomor CAS (<i>Chemical Abstracts Service</i>), spesifikasi zat, tujuan penggunaan dan hasil pengujian) yang diproduksi oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Setiap tahun, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
57	Materi terkait pengawasan Obat dan Makanan	Materi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan dan Informasi (SIMPHONI)	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah ditetapkan, Inaktif 4 tahun (Musnah)	https://ppsdm.pom.go.id/simp-uni
58	Hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan	Informasi yang memuat: 1. Daftar/rekapitulasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan yang dilakukan 2. Abstrak/ringkasan eksekutif hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://riset.pom.go.id/riset-kajian
59	Daftar produk Obat dan Makanan yang teregistrasi di BPOM	Data Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan yang teregistrasi/ternotifikasi di BPOM meliputi nama produk, Nomor Izin Edar (NIE), tanggal terbit NIE, nama perusahaan, dan status pemenuhan komitmen (untuk pangan olahan risiko menengah rendah)	1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan	1. Direktur Registrasi Obat 2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktur Registrasi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 5 Tahun (Permanen)	https://cekbpo.pom.go.id/ pada Menu Produk

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
60	Data rekapitulasi jumlah Nomor Izin Edar (NIE) Obat dan Makanan yang diterbitkan	Informasi mengenai rekapitulasi jumlah NIE Obat, NIE Obat Tradisional, Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan yang diterbitkan	1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan	1. Direktur Registrasi Obat 2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktur Registrasi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah izin edar tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://cekbpm.pom.go.id/
61	Daftar sarana pemilik Nomor Izin Edar produk Obat dan Makanan	Data sarana pemilik Nomor Izin Edar (Nama dan Alamat Kota Perusahaan) produk Obat, Obat Tradisional, Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan	1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan	1. Direktur Registrasi Obat 2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktur Registrasi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif selama tidak ada perubahan akun perusahaan, Inaktif 2 Tahun (Musnah)	https://cekbpm.pom.go.id/ pada Menu Sarana

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
62	Data pembatalan izin edar Obat dan Makanan	Data Pembatalan Nomor Izin Edar (Nama Produk, Nama Perusahaan, NIE dan Kemasan) Obat, Obat Tradisional, Obat Kesehatan, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan	1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan	1. Direktur Registrasi Obat 2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3. Direktur Registrasi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah terbit SK pencabutan, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://cekbpo.m.pom.go.id/pr/oduk_recall atau diberikan melalui permintaan
63	Data sarana produksi Obat dan Makanan	Informasi mengenai nama dan alamat kota perusahaan: 1. Industri farmasi dan sarana farmasi yang memproduksi Obat dan bahan Obat 2. Industri dan Usaha Obat Tradisional (Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional) 3. Industri Farmasi, Industri Pangan, Industri Obat	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik 4. Direktorat Pengawasan	1. Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktur Pengawasan Kosmetik	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		<p>Tradisional, atau Usaha Kecil Obat Tradisional yang memproduksi Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional atau Industri Kosmetik yang memproduksi Obat Kuasi</p> <p>5. Industri Kosmetik atau Fasilitas Bersama Industri Kosmetik dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>6. Industri Pangan Olahan yang terdaftar di BPOM</p>	<p>Produksi Pangan Olahan</p> <p>5. Direktorat Registrasi Pangan Olahan</p>	<p>3. Direktur Pengawasan Kosmetik</p> <p>4. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan</p> <p>5. Direktur Registrasi Pangan Olahan</p>					
64	Data sarana distribusi Obat dan Makanan	<p>Informasi mengenai:</p> <p>1. Nama Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah memperoleh Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dilengkapi dengan nomor dan masa berlaku Sertifikat CDOB, provinsi, jenis aktivitas, serta ringkasan/kesimpulan</p>	<p>1. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor</p> <p>2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</p>	<p>1. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor</p> <p>2. Direktur Pengawasan</p>	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		hasil pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi CDOB	3. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Obat Tradisional dan					
		2. Importir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Suplemen Kesehatan					
		3. Badan Usaha di bidang pemasaran Suplemen Kesehatan sebagai pemilik/pemegang izin edar		3. Direktur Pengawasan Kosmetik					
		4. Sarana Distribusi Kosmetik (data importir Kosmetik dan Badan Usaha sebagai pemilik/pemegang izin edar/notifikasi)		4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					
		5. Sarana Peredaran Pangan Olahan yang terdaftar di BPOM (data importir)							
		6. Sarana Peredaran Pangan Olahan yang mendapat Sertifikat Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)							
65	Data sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Informasi mengenai daftar sertifikat CPOB yang terbit dan Industri Farmasi di Indonesia yang memiliki sertifikat CPOB	Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah sertifikat CDOB tidak berlaku,	https://e-sertifikasi.pom.go.id/dataSertifikat

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
								Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://klikcpob.pom.go.id/sertifikat-cpob/
66	Data sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Data penerbitan sertifikat CPOTB bagi industri dan usaha di bidang Obat Tradisional (CPOTB penuh dan bertahap)	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah sertifikat CPOTB tidak berlaku, Inaktif 1 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
67	Data sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	Data penerbitan sertifikat CPKB dan Pemenuhan Aspek CPKB bagi industri dan usaha di bidang Kosmetik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	Direktur Pengawasan Kosmetik	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah persetujuan sarana/denah diperbarui, Inaktif 2 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
68	Data sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB)	Informasi mengenai daftar nama industri farmasi, nomor surat pencabutan izin, tanggal surat dan daftar sertifikat CPOB yang dicabut	Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Setiap ada pencabutan izin, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://klikcpob.pom.go.id/data-sertifikat-yang-dicabut/
69	Analisis tren pemenuhan CPOB	Analisis tren hasil pengawasan sarana produksi Obat dan bahan Obat.	Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Setiap saat, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 1 tahun	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
70	Data ringkasan hasil inspeksi CPOB	Informasi yang memuat laporan ringkasan kegiatan inspeksi CPOB yang dilakukan untuk fasilitas pembuatan vaksin, yang di dalamnya memuat cakupan inspeksi, ringkasan observasi dan kesimpulan	Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Setiap saat, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 1 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
71	Data izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Informasi mengenai Izin Penerapan CPPOB yang diterbitkan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan UPT di lingkungan BPOM	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta dan dan sesuai wilayah UPT	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://wasprod.pangan.pom.go.id/pelayanan-publik/pemukta-hiran-data#
72	Data sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Informasi mengenai daftar nama Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah memperoleh Sertifikat CDOB, dilengkapi dengan nomor dan masa berlaku Sertifikat CDOB, Provinsi, jenis aktivitas, serta ringkasan/kesimpulan hasil pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi CDOB	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah sertifikat CDOB tidak berlaku, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://sertifikasi.sicdob.pom.go.id/sertif/sertifikatgabungan.php

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
73	Daftar izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang dicabut	Informasi nama PBF yang telah dicabut izin/sertifikat distribusinya oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusannya	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Setiap ada pembatalan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://sertifika.sicdob.pom.go.id/sertif/sertifikat/dicabut.php
74	Data sertifikat CDOB yang dicabut	Informasi mengenai nama PBF yang telah dicabut Sertifikat CDOB-nya oleh BPOM, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusannya, serta alasan pencabutannya	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://sertifika.sicdob.pom.go.id/sertif/sertifikat/dicabut.php
75	Check list pemeriksaan sertifikasi CDOB (<i>Self Assesment</i>)	<i>Tools</i> pemeriksaan mandiri (<i>self assesment</i>) bagi PBF yang memuat daftar pertanyaan untuk menilai tingkat pemenuhan masing-masing aspek CDOB	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah sertifikat CDOB tidak berlaku (Musnah)	https://sertifika.sicdob.pom.go.id pada Menu Informasi
76	Data rekapitulasi persetujuan iklan Obat, Obat Tradisional,	Informasi mengenai rekapitulasi persetujuan iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi, yang memuat:	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,	1. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat,	Sepanjang Tahun, Jakarta	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://sireka.pom.go.id/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
	Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi	1. Jumlah iklan yang disetujui, ditolak, dan dibatalkan 2. Jumlah persetujuan iklan berdasarkan media (media elektronik, media cetak dan media luar ruang)	1. Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
77	Panduan pemasukan Obat melalui jalur khusus/ <i>Special Access Scheme</i> (SAS)	Informasi berupa panduan bagi industri farmasi, Rumah Sakit atau institusi untuk memasukkan obat dan produk biologi ke wilayah Indonesia melalui jalur khusus meliputi kelengkapan dokumen atau persyaratan dan waktu pelayanan	Direktorat Registrasi Obat	Direktur Registrasi Obat	Sejak tanggal ditetapkan, Jakarta	√	√	Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://e-bpom.pom.go.id/
78	Data pengembalian Nomor Izin Edar Obat	Informasi mengenai data pengembalian Nomor Izin Edar Obat yang memuat surat pengantar dari industri farmasi, lembar persetujuan izin edar dan formulir registrasi dengan	Direktorat Registrasi Obat	Direktur Registrasi Obat	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah izin edar tidak berlaku, Inaktif 2 Tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		dokumen registrasi (apabila produk tidak akan diproduksi kembali)							
79	Daftar persetujuan pelaksanaan uji klinik Obat dan Produk Biologi	Informasi tentang daftar Obat dan Produk Biologi yang sudah selesai uji klinik beserta peneliti atau institusi yang mengajukan uji klinik	Direktorat Registrasi Obat	Direktur Registrasi Obat	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah izin edar tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	Diberikan melalui permintaan
80	Kajian terkait produk tembakau yang sudah dipublikasikan	Informasi terkait regulasi dan perkembangan produk tembakau serta bahayanya terhadap kesehatan	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 5 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
81	Data rekapitulasi jumlah pengawasan promosi/iklan dan label produk tembakau	Informasi yang memuat rekapitulasi jumlah hasil pengawasan terhadap promosi/iklan dan label produk tembakau yang dilakukan UPT BPOM	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://kmei.pom.go.id pada Menu Laporan, dalam Laporan Tahunan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
82	Data rekapitulasi persetujuan pelaksanaan uji praklinik dan klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik	Informasi yang memuat data rekapitulasi permohonan Peretujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) dan dan Peretujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) pada Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang telah selesai, berisi nama protokol; sponsor; nomor PPUPK dan PPUK; serta tanggal PPUPK dan PPUK	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 2 tahun (Permanen)	Diberikan melalui permintaan
83	Panduan registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Buku Panduan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 5 tahun, inaktif 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • https://asrot.pom.go.id/asrot/index.php/home/depan/prosedur • https://asrot.pom.go.id/asrot/index.php/home/depan/download • https://asrot.pom.go.id/asrot/index.php/home/depan/brosur

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
84	Prosedur pelaporan efek samping Obat	Prosedur pelaporan efek samping obat melalui <i>subsite</i> e-meso.pom.go.id yang antara lain berisi panduan untuk registrasi akun, penggantian <i>password</i> dan <i>entry</i> laporan	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Selama prosedur masih berlaku	https://e-meso.pom.go.id/subsite/
85	Prosedur pelaporan Efek Samping Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Informasi mengenai data yang perlu dilaporkan (data produk, data pelapor, data efek samping, data tambahan lainnya) serta tata cara melaporkan efek samping Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	1. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Selama prosedur masih berlaku	https://e-mesot.pom.go.id/emesotbpom2022/
86	Petunjuk Teknis Penerapan <i>Monitoring</i> Efek Samping bagi Pemegang Izin Edar Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Informasi yang memuat panduan mengenai teknis penerapan dan pelaksanaan <i>monitoring</i> efek samping Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bagi pemegang izin edar	1. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	1. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://jdih.pom.go.id/view/slide/4c43212f3dae11676ba6b0d63686a1f3/1350/HK.02.02.1.2.02.22.78/2022

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
87	Pedoman Penilaian Keamanan Bahan Baku Tumbuhan untuk Kosmetik	Informasi mengenai pedoman penilaian keamanan bahan baku tumbuhan untuk Kosmetik dengan mengacu pada <i>Botanical Safety Assesmenet Guideline</i> .	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2017, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar-otsskk.pom.go.id/publikasi/search?q=Pedoman+Penilaian+Keamanan+Bahan+Baku+Tumbuhan+untuk+Kosmetika
88	Data Pengawasan Promosi/Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Informasi yang memuat: 1. Hasil pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan setelah beredar dari seluruh UPT di lingkungan BPOM klasifikasi pelanggaran promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Sebaran iklan memenuhi dan tidak memenuhi ketentuan di peredaran	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
89	Daftar orang tua angkat jamu	Informasi mengenai data industri yang terdaftar sebagai orang tua angkat jamu	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat	Tahun 2023			Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://docs.google.com/document/d/1bhdLafCBlw1OD2IBfobXpXuUTCk4ifxJ/

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
			Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik					edit?usp=drive_link&oid=115324869616337456135&rtfpof=true&sd=true
90	Daftar nama industri pangan pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP-PMR)	Daftar nama industri pangan pemegang Piagam Program Manajemen Risiko (PMR) yang dipublikasikan melalui <i>website</i> Program Manajemen Risiko (PMR)	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://pmr.pom.go.id/register-ed
91	Daftar Usaha Kecil dan Menengah (UMK) pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap Sarana UMK Pangan Olahan	Informasi yang memuat UMK yang telah menerapkan Program Manajemen Risiko bertahap Sarana UMK Pangan Olahan dan dipublikasikan melalui <i>website</i> PMR	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://pmr.pom.go.id/register-ed
92	Daftar Pengawas Pangan PMR	Informasi yang memuat nama-nama pengawas pangan yang melakukan verifikasi terhadap penerapan PMR keamanan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://pmr.pom.go.id/foodinspectors

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		pangan dan dipublikasikan melalui <i>website</i> PMR							
93	Pedoman terkait Penerapan PMR Keamanan Pangan di sarana produksi Pangan Olahan	Informasi yang memuat pedoman teknis pelaksanaan, registrasi akun, dan pengajuan izin serta pelaporan terkait penerapan PMR Keamanan Pangan di sarana produksi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun	https://pmr.pom.go.id/rmpdoc
94	Data sarana peredaran Pangan Olahan	Informasi mengenai: 1. Nama dan alamat kota sarana peredaran yang terdaftar di BPOM (data importir) 2. Nama dan alamat kota sarana peredaran yang memiliki Sertifikat Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 5 tahun, tidak memiliki masa penyimpanan inaktif (Musnah)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bknZk4f46tlR2ctAMnBi86QqOLxL7tZP/edit#gid=15137401133
95	Pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa Etilen Oksida 2, 6-Diisopropilnaftalena dan 9, 10-Antrakinon	Pedoman ini merupakan acuan berisi informasi yang membantu produsen meminimalkan keberadaan ketiga senyawa pestisida dalam produknya. Pedoman ini memuat dasar teori ketiga senyawa pestisida serta rekomendasi cara	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktur Standardisasi Pangan Olahan)	31 Oktober 2022, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pom.go.id/dokumen/pedoman/E-BOOK_Pedoman_Mitigasi_Risiko_EG_DEG_Pangan_Olahan_ISB_N.pdf

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		memitigasi yang mungkin dilakukan							
96	Pedoman mitigasi risiko cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada Pangan Olahan	Pedoman ini merupakan acuan berisi informasi yang membantu produsen meminimalkan keberadaan kedua senyawa EG dan DEG dalam produk Pangan Olahan. Pedoman ini memuat dasar teori kedua senyawa tersebut serta rekomendasi cara memitigasi yang mungkin dilakukan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktur Standardisasi Pangan Olahan)	27 Desember 2022, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/E-BOOK_Pedoman_Mitigasi_Risiko_EG_DEG_Pangan_Olahan_ISBN.pdf
97	Pedoman implementasi periklanan Pangan Olahan	Pedoman ini memuat istilah dan definisi, ketentuan iklan pangan olahan, media periklanan yang menjadi lingkup pengawasan, larangan iklan pangan olahan, dan pengawasan iklan pangan olahan. Pedoman dilengkapi dengan contoh - contoh pernyataan dan ilustrasinya sehingga mudah dipahami	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	21 November 2022, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Sumber_Elektronis_Pedoman_Implementasi_Periklanan_Pangan_Olahan.pdf
98	Pedoman mitigasi risiko: penggunaan bahan	Pedoman ini merupakan acuan berisi informasi yang membantu produsen, konsumen, penjaja ataupun	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	11 Januari 2023, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku,	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
	penolong Nitrogen cair pada Pangan Olah	penjamah pangan dalam menangani penggunaan nitrogen cair untuk pangan olahan agar tidak melukai anggota tubuh ataupun menimbulkan efek kesehatan						Inaktif 2 tahun (Permanen)	Mitigasi Risiko Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair pada Pangan Olah.pdf
99	Pedoman pengkajian bahan baku Pangan	Uraian tentang prinsip pengkajian bahan baku pangan yang mencakup identifikasi dan karakterisasi bahan baku, kajian keamanan, penggunaan bahan baku pada pangan olahan, penetapan rekomendasi, dan dokumen pengkajian beserta pembuktian yang diperlukan	Direktorat Standardisasi Pangan Olah	Direktur Standardisasi Pangan Olah	1 Oktober 2020, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman-Pengkajian-Bahan-Baku-Pangan.pdf
100	Pedoman menurunkan cemaran Akrilamida dalam kopi olahan	Informasi yang membantu produsen kopi olahan menurunkan cemaran Akrilamida dalam produknya serta memuat teori akrilamida dan kopi beserta rekomendasi cara menurunkan cemaran Akrilamida dalam kopi olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olah	Direktur Standardisasi Pangan Olah	21 September 2020, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman-Menurunkan C emaran Akrilam ida dalam Kopi Olah.pdf

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
101	Pedoman label Pangan Olahan	Informasi yang memuat istilah dan definisi, kriteria label, keterangan lain, ketentuan lain-lain, dan larangan dalam label pangan olahan. Pedoman dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	1 Oktober 2020, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman-Label-Pangan-Olahan.pdf
102	Hasil kajian pengajuan permohonan keamanan, mutu, label dan manfaat Pangan Olahan	Informasi mengenai daftar persetujuan hasil kajian keamanan, mutu, label dan manfaat Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	2020, Jakarta	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id pada Menu Standardisasi
103	Pedoman label Pangan Olahan - susu kental dan analognya	<ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai panduan implementasi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya untuk jenis pangan susu kental dan analognya atau produk sejenis Pedoman memuat definisi, karakteristik dasar, dan ketentuan pelabelan susu kental dan analognya termasuk 	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	3 Mei 2021, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman-Label-Susu-Kental-dan-Analognya.pdf

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		peringatan dan hal yang dilarang dicantumkan pada label <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dilengkapi contoh dan ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan 							
104	Pedoman cara pengolahan dan penanganan Pangan Olahan beku yang baik	Informasi mengenai pangan olahan beku, deskripsi, kriteria, pengelompokan produk Kategori Pangan 16.0 Pangan Siap Saji (Terkemas), persyaratan keamanan dan pelabelan yang dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	1 November 2021, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman-Cara-Pengolahan-dan-Penanganan-Pangan-Olahan-Beku-Yang-Baik.pdf
105	Pedoman Pangan Siap Saji (Terkemas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman yang memuat pangan olahan beku, deskripsi, kriteria, pengelompokan produk Kategori Pangan 16.0 Pangan Siap Saji (Terkemas), persyaratan keamanan dan pelabelan. • Pedoman dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi sehingga lebih 	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	1 November 2021, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman_Pangan_Siap_Saji_Terkemas.pdf

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
		mudah dipahami dan diimplementasikan							
106	Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk pencapaian gizi seimbang	Informasi yang memuat kebutuhan gizi anak sekolah (sumber makanan dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan), pesan gizi seimbang untuk anak sekolah, cara memilih pangan dan PJAS yang sesuai dalam rangka pencapaian gizi seimbang anak sekolah serta peran orang tua, guru, dan pengelola kantin sekolah dalam pencapaian gizi seimbang untuk anak sekolah, serta informasi kandungan gizi PJAS	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	30 Desember 2021, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman_Pangan_Jajanan_Anak_Sekolah_untuk_Pencapaian_Gizi_Seimbang.pdf
107	Pedoman Implementasi Regulasi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Informasi rinci terkait panduan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta label MP-ASI untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengimplementasikan regulasi terkait MP-ASI	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	31 Desember 2021, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://standar.pangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman_Implementasi_Regulasi Makanan Pendamping Air Susu Ibu Mp-Asi untuk Pelaku Usaha Mikro dan M

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
									enengah UMK M .pdf
108	Petunjuk teknis penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di masa pandemi COVID-19	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://pmpupo.pom.go.id/asset/s/keterbukaan_informasi publik /serta_merta/Surat_Edaran_Ju knis_Penerbitan_SPPIRT_di_mas a_pandemi_14-03-2021_207.pdf
109	Pedoman produksi dan distribusi Pangan Olahan di masa pandemi COVID-19	Panduan bagi pelaku usaha pangan olahan dalam hal produksi dan distribusi pangan olahan di masa pandemi COVID-19	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, inaktif 2 tahun (Permanen)	https://istanau mkm.pom.go.id/pangan/pedoman-produksi-dan-distribusi-pangan-olahan
110	Petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terkait Obat Tradisional,	Informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Program <i>B POM Goes to School/ Campus</i> dan Program <i>B POM Goes to Community</i>	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen	Setiap melaksanakan kegiatan, dan atau setiap ada perubahan	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://pmpuot skkos.pom.go.id/files/setiapsaat /PEDOMAN%20 PEMILIHAN%20 DUTA_13MAR2022.pdf

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
	Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			Kesehatan, dan Kosmetik					
111	Data fasilitator keamanan Pangan	Data fasilitator keamanan Pangan dari organisasi masyarakat/asosiasi/inkubator bisnis	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Setiap saat, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://istanau.mkm.pom.go.id pada Menu Fasilitator
112	Data hasil patroli siber Obat dan Makanan	Jumlah rekapitulasi data hasil patroli siber Obat dan Makanan	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Direktur Siber Obat dan Makanan	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
113	Data obat <i>recall</i> yang telah dipublikasikan di <i>website</i> BPOM	Informasi terkait obat yang telah dilakukan penarikan dari peredaran	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://cekbpo.m.pom.go.id/prодук_recall
114	Data persentase Obat memenuhi syarat	Informasi mengenai persentase obat yang memenuhi syarat hasil pengawasan berdasarkan hasil sampling dan pengujian setiap tahun	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
			Prekursor, dan Zat Adiktif	Prekursor, dan Zat Adiktif		Softcopy	Hardcopy		
115	Materi KIE Obat dan Makanan	Materi tentang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bahan KIE kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> dapat berupa namun tidak terbatas dalam bentuk <i>FAQ</i> , buku, modul, infografis, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , bahan ajar, dan lain-lain	Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM terkait	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM terkait	Diperbaharui setiap ada perubahan, Jakarta dan sesuai wilayah UPT	√		Aktif 3 tahun, Inaktif 1 tahun (Musnah)	https://www.pom.go.id/layanan#v-pills-2
116	Informasi kegiatan Desa Pangan Aman	Informasi yang memuat laporan per-tahapan kegiatan program prioritas nasional Desa Pangan Aman yang dilaksanakan UPT di lingkungan BPOM tahun 2022	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan)	Tahun 2022, sesuai wilayah UPT	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
117	Informasi kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Informasi yang memuat laporan per-tahapan kegiatan program prioritas nasional PJAS yang dilaksanakan UPT di lingkungan BPOM tahun 2022	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan)	Tahun 2022, sesuai wilayah UPT	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
118	Informasi kegiatan Pasar Aman	Informasi yang memuat laporan per-tahapan kegiatan program prioritas nasional Pasar Aman yang dilaksanakan UPT di lingkungan BPOM tahun 2022	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan)	Tahun 2022, sesuai wilayah UPT	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	Diberikan melalui permintaan
119	Data pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan	Informasi mengenai rekapitulasi jumlah pengawasan iklan dan label/penandaan Obat dan Makanan	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap tahun, sesuai wilayah UPT	√	√	Aktif 3 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)	https://app.pow-erbi.com/view?r=eyJrIjoiNjM0ZTI0M2EtNjBmOC00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOClzImQzLTdjZDA5NGM5MDCwZSIsImMiOiEwfQ%3D%3D pada Menu Pengawasn Iklan dan Label

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
120	Data sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi	Data rekapitulasi jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di seluruh wilayah UPT di lingkungan BPOM	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap tahun, sesuai wilayah UPT	√	√	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://app.pow-erbi.com/view?r=eyJrJoiNjMOZTIOM2EtNjBmOC00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOCljZmOzLTdjZDA5NGM5MDcwZSIsImMiOjEwfQ%3D%3D pada Menu Sarana Produksi
121	Data sarana distribusi Obat dan Makanan yang diawasi	Data rekapitulasi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diawasi di seluruh wilayah UPT di lingkungan BPOM	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap tahun, sesuai wilayah UPT	√	√	Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun (Permanen)	https://app.pow-erbi.com/view?r=eyJrJoiNjMOZTIOM2EtNjBmOC00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOCljZmOzLTdjZDA5NGM5MDcwZSIsImMiOjEwfQ%3D%3D

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
									pada Menu Sarana Distribusi
122	Data rekapitulasi jumlah sertifikasi Obat dan Makanan yang diterbitkan	Data rekapitulasi jumlah sertifikasi yang diterbitkan berupa izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), rekomendasi penotifikasi Kosmetik, jumlah persetujuan denah Pedagang Besar Farmasi (PBF), rekomendasi surat penerapan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap tahun, Jakarta	√		Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)	https://app.pow.erbi.com/view?r=eyJrIjoiNiMOZTIOM2EtNjBmOC00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOCljZmOzLTdjZDA5NGM5MDcwZSIsImMiOiEwfQ%3D%3D
123	Data rekapitulasi jumlah hasil pengujian Obat dan Makanan	Data rekapitulasi jumlah hasil pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan oleh seluruh UPT di lingkungan BPOM	Seluruh UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Seluruh Kepala UPT di lingkungan BPOM (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap tahun	√	√	Aktif 1 tahun setelah tindak lanjut selesai, Inaktif 3 tahun (Permanen)	https://app.pow.erbi.com/view?r=eyJrIjoiNiMOZTIOM2EtNjBmOC00MjkyLTg5Y2MtMmViNzI4OTNmNWFlIiwidCI6ImFhZTY4MmMzLTViYmItNDBiOCljZmOzLTdjZDA5NGM5MDcwZSIsImMiOiEwfQ%3D%3D

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Link Akses Informasi
						Softcopy	Hardcopy		
									SIsImMiOjEwfQ%3D%3D pada Menu Pengujian
124	Informasi yang tersedia di <i>website/subsite/media sosial</i>	Informasi yang tersedia di <i>website/subsite/media sosial</i> BPOM, Unit Kerja Pusat, dan UPT di lingkungan BPOM	Seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Seluruh Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap ada perubahan, Jakarta dan sesuai wilayah UPT	√		Aktif 2 tahun Inaktif 2 tahun (Musnah)	<ul style="list-style-type: none"> Website: www.pom.go.id Instagram @BPOM_RI Facebook Page @bpom.official Twitter @BPOM_RI Subsite dan Media Sosial Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM